

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Reformasi Birokrasi dan Profesionalisme aparatur Sipil Negara maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

A.1. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi di DIY sesungguhnya telah dimulai sejak Maklumat Nomor 10 Tahun 1946 tentang Perubahan Pangreh Praja menjadi Pamong Praja, sebagai titik awal landasan perubahan filosofis pemerintahan dari pola penguasa menjadi pelayan, pengayom masyarakat. Upaya reformasi semakin kuat bergulir sejak diberlakukannya otonomi daerah, ditandai dengan kerjasama dengan Kemitraan (Partnership) bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia untuk menyelenggarakan Reformasi Terpadu Pelayanan Publik (Integrated Civil Service Reform - ICSR). Ada 4 perubahan dalam reformasi birokrasi di DIY, sebagai berikut :

A.1.1. Perubahan Cara Berpikir

perubahan cara berpikir diawali dari Peraturan Gubernur Nomr 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berlaku untuk aparatur Pemda DIY dan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di dalamnya. Dari Pergub dimaksud dikenal Budaya Pemerintahan Satriya

A.1.2. Penguasa Menjadi Pelayan

Perubahan paradigma pelayanan publik yang terdapat di DIY melalui beberapa tahapan yakni paradigma old public administration, new public management, dan new public service. Saat ini paradigma pelayanan publik yang digunakan di Indonesia adalah paradigma New Public service. Paradigma ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertera pada peraturan gubernur nomor 33 tahun 2012 tentang standar pelayanan publik.

A.1.3. Manajemen Kinerja

Reformasi manajemen kinerja di DIY diawali dengan perubahan organisasi, perubahan organisasi yang terjadi di DIY adalah dengan adanya pengurangan jumlah pejabat struktural DIY yang sebelumnya berjumlah 1.639 orang kemudian setelah adanya reformasi birokrasi pejabat struktural berkurang menjadi 797 orang, dan pengurangan pegawai dari 12.000 orang menjadi 7.648 orang. pemerintahan yang proporsional adalah pemerintahan yang menjalankan fungsi dan tugas dengan mengarah kepada kinerja yang efektif dan efisien.

A.1.4. Pemerintahan yang Baik

Reformasi Birokrasi mulai dicanangkan sejak PERMENPANRB mengeluarkan peraturan nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map adalah acuan pemerintah daerah dalam melakukan perubahan pada sektor-sektor yang ingin adanya perubahan. dalam Road Map Reformasi Birokrasi DIY ada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu organisasi, tatalaksana, perundang-undangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mind set. Dalam 8 area perubahan tersebut daerah DIY sudah melakukan perbaikan dalam birokrasi.

A.2. Profesionalisme

Profesionalisme yang ada di DIY sudah terlihat perubahan sejak sebelum diberlakukannya peraturan tentang reformasi birokrasi, profesionalisme aparatur negara dalam fungsinya sebagai aparatur negara. upaya pemerintah DIY dalam pengembangan aparatur sudah dimulai dengan peningkatan kemampuan atau kompetensi yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun non diklat.

Peningkatan profesionalisme melalui diklat dapat dilakukan melalui pengiriman aparatur dalam diklat teknis fungsional, pendidikan formal maupun non formal atau pendidikan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau kompetensi teknis maupun perubahan pola pikir, moral, dan perilaku SDM aparatur. Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dimana manajemen Sumber Daya Aparatur Negara merupakan salah satu bagian penting dari pengelolaan pemerintahan negara yang bertujuan membantu dan mendukung seluruh sumber daya manusia aparatur sipil negara untuk merealisasikan seluruh potensi mereka sebagai pegawai pemerintah dan sebagai warga negara.

A.2.1. Inovasi

Dalam rangka peningkatan kinerja baik berupa mutu layanan maupun dalam kestabilan pemerintahan penerapan inovasi-inovasi baru perlu dilakukan. Inovasi yang mulai dikembangkan di lingkungan di DIY berupa :

A.2.1. pengembangan sistem elektronik

Pengembangan sistem elektronik di DIY digunakan sebagai alat untuk menjaga kestabilan pemerintah yang akan berdampak langsung pada sebuah

kebijakan, maka dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan terutama yang berhubungan dengan kepegawaian seharusnya dilakukan dalam waktu yang cepat, tepat dan akuntabel. pemerintah provinsi DIY membangun dan mengembangkan aplikasi berbasis internet yang digunakan dalam proses-proses manajemen antara lain:

- a. SIMPEG (aplikasi penunjang manajemen kepegawaian)
- b. e-CPNS (aplikasi penunjang seleksi CPNS)
- e. e-Presensi (aplikasi penunjang mesin presensi)
- d. e-Document (aplikasi penunjang dokumen mulai dari pencatatan surat masuk, penulisan disposisi sampai penyelesaian lebih lanjut)

A.2.2. Peningkatan Kualitas Layanan Melalui Penerapan ISO

Dalam rangka meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat, aparatur maupun PTT pada tahun 2012, BKD DIY membangun sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu yang dibangun berstandar mutu internasional yakni ISO 9001 versi 2008. Pembangunan sistem dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima kepada users, kejelasan prosedur, tata kerja serta dokumentasi arsip.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat di ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- B.1. Dalam penelitian ini tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi, diharapkan pemeruintah DIY lebih serius dalam melakukan Reformasi Birokrasi, agar pemerintahan DIY menuju *Good Governance*, sehingga masyarakat tidak bersikap apatis terhadap Aparatur sipil Negara yang ada di pemerintahan DIY.

B.2. Profesionalisme aparatur harus selalu ditekankan kepada seluruh aparatur pemerintahan DIY, agar terciptanya lingkungan pemerintahan yang profesional, sehingga akan banyak terciptanya inovasi-inovasi baru yang akan semakin membuat pemerintah menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albrow, Martin. 2005. *Birokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ali, Eko Maulana. 2012. *Kepemimpinan Transformasional Dalam Birokrasi Pemerintahan*. PT. Multicerdas Publishing.
- Azwar, Saifuddin. 1999. *Reliabilitas dan Validitas: Seri Pengukuran Psikologi*. Yogyakarta: Sigma Alpha.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2012. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif (Ed)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sedarmayanti. 2010. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Setiyono, Budi. 2012. *Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2011. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana Prenada.

Internet

- Achmad Nurmandi. 2012. *Pemekaran Daerah Dan Kinerja Birokrasi Daerah Evaluasi Kinerja Daerah Otonom Di Provinsi Riau*. nurmandi_achmad@umy.ac.id.
- Didit Eko Setiawan. Reformasi Birokrasi: Perubahan, diakses melalui <http://www.itjen.kkp.go.id/artikel/39-ap/73-reformasi.html> pada tanggal 20
- Eko Prasajo. 2012. *Percepatan Reformasi Birokrasi sebagai Kunci Keberhasilan Pembangunan Nasional*, diakses melalui www.iaitbjakarta.com/files/Makalah_Eko_Prasajo.doc
- <http://teorionline.wordpress.com/2010/01/24/populasi-dan-sampel/>
- <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/diy/files/>, diakses .
- <http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=1431>,
- <http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=3707>